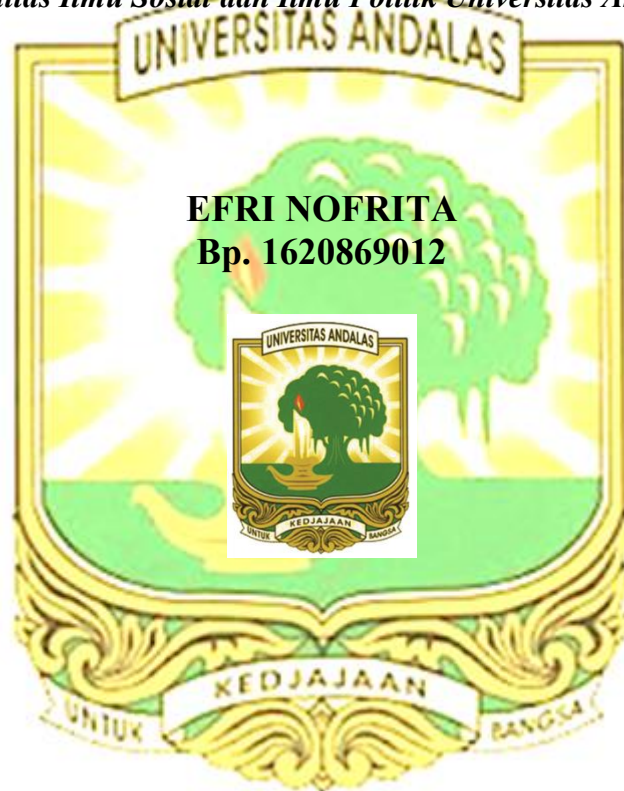


**POLITIK ANGGARAN PILKADA KPU PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

TESIS

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**EFRI NOFRITA
Bp. 1620869012**

**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

POLITIK ANGGARAN PILKADA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

Oleh : EFRI NOFRITA (1620869012)
(Dibawah bimbingan : Dr. Aidinil Zetra, MA. dan Dr. Ria Ariany, M.Si)

ABSTRAK

Wacana pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBN merupakan suatu upaya untuk menghindari politisasi APBD oleh *incumbent* dalam pilkada, namun sampai pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2015 wacana tersebut masih belum terwujud. Sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus terlibat dalam konflik kepentingan dalam penetapan anggaran hibah pilkada dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait. Kemudian terjadi keterlambatan penetapan NPHD hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2015 sehingga mengganggu proses pelaksanaan pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi politik anggaran dalam proses penetapan anggaran hibah pilkada Tahun 2015 yang dibiayai oleh APBD. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan publik oleh James Anderson yaitu “langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Adapun nilai-nilai yang mempengaruhi para aktor ini dalam mengambil keputusan kebijakan adalah *political values*, *organization values*, *personal values* dan *policy values*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penetapan anggaran hibah pilkada para aktor tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai *political values* yang dapat menguntungkan partai politiknya dan *personal values* yang dapat menguntungkan pribadi atau personal dari kebijakan yang ditetapkannya. Namun nilai yang mempengaruhi aktor dalam penetapan anggaran hibah pilkada adalah *organization values* dan *policy values*, dimana aktor berpandangan bahwa pilkada merupakan kebutuhan nasional dan kepentingan rakyat yang harus dilaksanakan sehingga mendorong pembuat keputusan bertindak baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaannya pada kebijakan publik yang secara moral benar dan pantas. Anggaran pilkada yang bersumber dari hibah APBD dinilai cukup efektif namun penetapan regulasi yang mengaturnya harus sinkron dengan jadwal penyusunan APBD, sehingga anggaran bisa ditetapkan sebelum tahapan pilkada dimulai dan dana tersedia tepat waktu sesuai tahapan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara semua pihak yang berkepentingan baik dari unsur DPR selaku pembuat undang-undang pilkada, Pemerintah Pusat melalui Mendagri yang bertugas mengatur tentang pengelolaan dana kegiatan pilkada dan KPU yang mengatur dan menetapkan jadwal pilkada.

Keyword : Pilkada, politik anggaran, kebijakan publik.

BUDGETING POLITICS OF LOCAL ELECTIONS KPU SUMATERA BARAT IN 2015

By : EFRI NOFRITA (1620869012)
(Supervised by : Dr. Aidinil Zetra, MA. dan Dr. Ria Ariany, M.Si)

ABSTRACT

The discourse of election financing sourced from state budget is an effort to avoid the politicization of local expenditure by incumbent in the election, but until the implementation of elections simultaneously in 2015 the discourse is still not realized. Therefore, the Provincial KPU and Regency/Municipal KPU must be involved in a conflict of interest in the determination of the regional budget grant with the Regional Government and related parties. Then there was the delay in determining the NPHD in almost all regions conducting the concurrent elections in 2015. This study aims to explore politics of budgeting in the process of determining the grant budget for the implementation of lokal elections of 2015 funded by local expenditure by looking at the values that influence the actors in making budget policy decisions and viewing the process of lobbying, negotiation and authority as well as the role of actors involved in the determination of the local elections budget. This study is descriptive with a qualitative approach to analyze data conducted by using the public policy theory by James Anderson is "action steps that are intentionally performed by an actor or a number of actors with regard to the existence of certain problems or problems encountered by agencies and Government officials". The values that influence these actors to make and take policy decisions are political values, organizational values, personal values and policy values. The results show that in the process of determining the the local elections budget the actors are not influenced by the political values that can benefit political parties and personal values that can benefit personally of the policy. However, the value that influence the actors in the determination of the local elections budget is the organization values and policy values, in which the actors hold that local elections is a national need and the people's interest must be implemented so as to encourage decision makers to act well based on their perception of public interest or their belief in public policy that is morally right and proper. Election budgets sourced from local elections budget are considered to be quite effective but the regulation stipulation that regulates should be in sync with the budget preparation schedule, so the budget can be set before the local elections stage begins and funds are available on time according to the stage. Therefore, it is necessary to coordinate between all stakeholders both from the house of representatives as the election lawmakers, the Central Government through the Minister of Home Affairs that is responsible for regulating the management of funds for election activities and the KPU which regulates and stipulates the election schedule.

Keywords : Local elections, politics of budgeting, public policy.